

Kepemimpinan dalam Masyarakat Islam di Indonesia

Syamsudin RS

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: syamsudinrs@uinsgd.ac.id

Abstract

This paper describes the reality of Muslims in Indonesia showed the phenomenon of diversity, both in religious understanding and in manifestasinya on religious social movements. This diversity is in line with the pluralism of Indonesian society itself, on the basis of ethnicity, language and religion. In some cases, this phenomenon is an opportunity and challenge for Muslims in Indonesia to be able to realize the ideals of the ideal leadership in sociologically and theologically.

Kata kunci:

Kepemimpinan, masyarakat Islam, kepemimpinan transformasional

A. Pendahuluan

Sebagai risalah yang sempurna, Islam tidak hanya mengajarkan tentang aspek-aspek rohaniah, ibadah (ritual) semata, akan tetapi ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam terletak pada kesempurnaan Islam sebagai agama. Islam itu ibarat ratu adil yang menjadi tumpuan harapan sebagian besar umat manusia. Ia harus mengangkat ummat dari kehinaan menjadi mulia, menunjuki manusia yang tersesat jalan, membebaskan manusia dari kedzaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, dan diskriminasi antar elati. Tugas Islam memberikan dunia hari depan cerah dan penuh harapan. Manusia akhirnya merasakan nikmat karena Islam (Razak, 2009: 80).

Konsekuensi dari keharusan terwujudnya risalah Islam di muka bumi ini, maka setiap pemeluk Islam memikul tanggung jawab bekerja memperjuangkannya. Dengan kata lain, setiap muslim berkewajiban

untuk mendakwahkan Islam, yaitu merubah situasi yang belum Islami ke dalam situasi islami dalam berbagai aspek kehidupan adalah bahasa lain menginternalisasikan Islam kedalam kehidupan manusia.

Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan antara lain untuk menjadi khalifah di muka bumi ini yang memiliki kewajiban untuk mengelola kehidupan dunia sesuai dengan kehendak Allah. Maka dengan bekal Islam, kaum muslimin dituntut untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan menjadikan Al-Quran sebagai *terms of reference*-nya.

Dalam tugas kekhalfahan itu menurut M. Amin Rais (1998: 25), dakwah menjadi bagian paling esensial, karena pembangunan manusia dan masyarakat sebagaimana di kehendaki Allah Sang Maha Pencipta hanya dapat terselenggara jika secara individual maupun kolektif manusia dan masyarakat menyambut dakwah *ila Allah* dan menebarkan amal shaleh. Karena risalah Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka kegiatan dakwah pun sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia itu. Dengan demikian kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya dapat dijadikan kegiatan dakwah Islam.

B. Dakwah dan Kepemimpinan Islam

Dakwah merupakan rekonstruksi muslim sesuai dengan ajaran Islam. Semua bidang kehidupan dakwah dijadikan arena dakwah, dan seluruh kegiatan hidup manusia ela digunakan sarana atau *wasilah* dakwah. Kegiatan politik misalnya, sebagaimana kegiatan ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan ilmu dan teknologi, kreasi seni, kodifikasi hukum, dan lain sebagainya, bagi seorang muslim seharusnya memang menjadi alat dakwah (Amin Rais, 1998: 27).

Politik sebagai salah satu aspek kehidupan manusia menurut Miriam Budiarto (1989: 8), pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem

politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Kebijakan yang bersifat umum yang meliputi pengaturan dan pembagian, merupakan hal yang mesti ada dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan di atas. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakinya dapat bersifat elativem (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*) (Budiarjo, 1989: 8).

Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan bagi seorang muslim hendaknya menjadi kegiatan integral dari kehidupan yang utuh, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya ela hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya (Rais, 1998: 27).

Mengenai definisi politik, Amin Rais (1990: 27) berpendapat, bahwa politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Tetapi bagaimanapun ia didefinisikan, satu hal sudah pasti, bahwa politik menyangkut kekuasaan dan bagaimana cara penggunaan kekuasaan.

Ungkapan di atas sejalan dengan pendapat yang diajukan Budiarjo (1989: 102), bahwa politik pada intinya adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Hertz dalam bukunya *Political Realism and Idealism* yang dikutip oleh F. Isjwara (2005: 54) mengakui bahwa kekuasaan adalah satu keharusan bagi hidup bersama, yang aman dan tentram. Apabila manusia mengutamakan keamanan daripada kekacauan dan anarki, maka manusia harus menerima kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dan karena hidup bersama manusia didasarkan atas perdamaian dan keamanan, maka sebagai konsekuensinya manusia harus menerima elativ itu.

Kekuasaan merupakan gejala sosial, gejala yang terdapat dalam pergaulan hidup. Kekuasaan adalah gejala antar individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok, atau antar Negara dengan Negara, gejala kekuasaan hanya dikenal oleh manusia (Isjwara, 2005: 52).

Ada dua jenis kekuasaan dalam politik yang saling berlawanan. Pertama kekuasaan antagonis dan yang kedua kekuasaan integrasi. Keduanya walaupun bertentangan, tapi mesti ada dan harus terjadi. Dalam kata pengantar buku Sosiologi Politik, karya Mourice Duverger, Alfian (1982: XIII) mengemukakan, ada dua corak pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Pertama, bila orang melihat pertempuran, dalam hal ini kekuasaan memungkinkan mereka berhasil merebut dan mengontrolnya untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Di samping itu, ada pihak lain yang menentang dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama. Disini kita lihat kekuasaan memainkan peranan sebagai biang konflik dan alat untuk menindas. Aspek kedua muncul bilamana orang menganggap bahwa politik adalah suatu upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Dalam hal ini kekuasaan dilihat sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tekanan dan aturan berbagai kelompok kepentingan.

Dengan demikian di satu pihak kekuasaan berfungsi sebagai biang antagonis (konflik), sementara di pihak lain dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai benih integrasi dan kerjasama. Dialektika elativem (konflik) dengan integrasi merupakan hakekat dari politik.

Sebenarnya kekuasaan bukanlah sesuatu yang baik atau buruk, karena baik atau buruknya kekuasaan hanya dapat dinilai dari penggunaan kekuasaan itu. Apa yang dikemukakan Mourice Duverger di atas, jelas ditujukan pada nilai-nilai pragmatis sebuah kekuasaan.

Sebagai bagian integral dari syari'at Islam, politik bagi kaum muslimin hendaknya juga merupakan bagian integral dari aktivitas kehidupannya. Dengan landasan ini Islam jelas menolak adanya sekularisasi –lebih jauh lagi sekularisme- yang memisahkan agama dari kegiatan politik.

Politik menurut konsepsi syari'at Islam adalah politik yang didasarkan atas moralitas keagamaan dengan tauhid sebagai ruhnya. Sehingga kekuasaan bagi kaum muslimin bukan untuk kekuasaan atau politik untuk politik., melainkan politik atau kekuasaan yang penuh komitmen kepada Tuhan pemelihara alam Allah SWT.

M. Amin Rais (1990: 31) membagi politik kedalam dua tingkatan yaitu politik kualitas tinggi (*high politic*) dan politik kualitas rendah (*low politic*). Menurutnya politik kualitas tinggi sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri :

Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan harus dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara orde atau tertib sosial yang egalitarian.

Kedua, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya, yang bukan hanya tanggung jawab di hadapan lembaga atau institusi, melainkan juga di hadapan Allah kelak di akherat –tanggung jawab inilah justru yang paling penting-.

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip-prinsip ukhuwah (*brotherhood*), yakni persamaan diantara umat manusia, yang dalam arti luas meliputi batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan, dan sebagainya.

Sebagai khalifah Allah di muka bumi, kaum muslimin berkewajiban untuk menjalankan sistem politik yang selaras dengan tuntutan syari'at, sehingga dunia akan dapat dikendalikan sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta. Dengan politik seperti ini, tak dapat diragukan lagi merupakan bagian dari dakwah, karena berpijak pada sumber yang sama serta berjalan pada poros yang sama dan keduanya bertujuan untuk menciptakan dunia yang berjalan selaras dengan ketentuan Ilahi.

Seperti sudah dikemukakan di atas, bahwa politik tidak terlepas dari kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan, maka dalam sistem politik Islam pun dinyatakan adanya kekuasaan dan penguasa serta cara-cara penggunaan kekuasaan tersebut. Dalam Islam penguasa

disebut “Amir” yang wajib dita’ati oleh umat (rakyat). Abul A’la al-Maududi (1990: 205) menyatakan, Siapapun yang diberi beban untuk mengatur urusan-urusan kaum muslim, berhak untuk dita’ati dan diikuti di elati masing-masing.

Bagi Islam, keharusan taat ini bukan hanya keharusan secara manusiawai, melainkan kewajiban syariat, sehingga siapapun yang menolak kewajiban ini, maka termasuk kepada perbuatan maksiat (berdosa). Begitu pentingnya masalah ketaatan ini, sehingga Al-Quran mensejajarkan ketaatan kepada pemimpin ini dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Umar bin Khatab berkata : “elativ Islam kecuali dengan jamaah, elativ jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan elativ kepemimpinan kecuali tanpa ketaatan” (Abdurrahman, 1993: 35).

Oleh karena itu Islam menekankan akan urgensi loyalitas kepada jamaah muslimin dan ketaatannya kepada pemimpin mereka, serta tidak keluar dari jamaah, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Loyalitas dan ketaatan umat (rakyat kepada pemimpinnya, itu didasari keikhlasan mereka untuk berbai’at, sehingga bai’at menurut sistem politik Islam merupakan peneguhan antara umat kepada imam atau khalifah mereka (Abdurrahman, 1993: 35-36).

C. Pemimpin Masyarakat Islam

Telah menjadi kesepakatan (ijma) para ulama, bahwa sesudah wafatnya Nabiullah Muhammad Saw., tidak boleh taat kepada pemimpin (*ulil amri*) kecuali dalam batas-batas yang telah diperintahkan Allah; dan para fuqaha (ahli fiqh Islam) dan para mujtahidin telah sepakat pula, bahwa taat hukumnya tidak wajib, melainkan dalam apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan tidak ada perselisihan atau silang pendapat diantara mereka, baik menurut perkataan, maupun dalam i’tikad, bahwa tidak boleh taat bagi makhluk dalam hal-hal yang mendurhakai khalik.

Bagi pemimpin Islam, harus memastikan menjamin terlaksananya *nas-nas syari’at* Islam. Dan mampu mengatur masyarakat dan melindungi serta memenuhi kebutuhan atas tegaknya (*asas-asas*) *syari’at* Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemimpin yang ditaati adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap perintah pimpinan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-nya wajib ditaati. Dan sebaliknya jika seorang pemimpin menyuruh atau memberi instruksi, tetapi perintah itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, tidak patut didengar dan ditaati.

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatlah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Qur'an dan sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (Qs. An-Nisa :59).

Dan barangsiapa mengambil (menjadikan) Allah dan Rasul-nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya (pemimpin), maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang. Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman (QS. Al-Maidah: 56-57).

Selain itu perlu diperhatikan, bahwa ketaatan kepada pimpinan bukan didasarkan kepada keturunan, golongan, karena suka atau tidak suka, akan tetapi karena kemampuan kepemimpinannya walaupun dari golongan atau keturunan mana pun juga. Dalam hubungan ini Rasulullah Saw pernah bersabda; *Dengar dan taatlah, walaupun hamba bangsa Habsyi yang menjadi pemimpinmu, selama ia menjalankan hukum Allah diantara kamu.*

Allah telah memberikan patokan, bagaimana ketentuan kaum muslimin dalam mengangkat pemimpinnya. Dewasa ini banyak para pemimpin yang dengan kelicikannya mengaku islam hanya untuk mencari dan memperoleh dukungan. Akan tetapi apabila dukungan itu telah berhasil, maka kembali ajaran Islam ditinggalkannya.

Mereka sangat pandai membuat siasat dan strategi, ela senyum di hadapan orang yang tidak disukainya. Semua mereka lakukan hanya untuk memperoleh kedudukan dengan mencari dukungan. *“Ingat kamu ini suka kepada mereka, sedang mereka tidak suka kepadamu, dan kamu percaya kepada isi kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: Kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, menggigit ujung jari lantaran mereka bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati”* (QS. Ali Imran:118)

Dilarang pula menurut Islam, orang yang mempermainkan agama diangkat sebagai pemimpin, Firman Allah: *“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu jadikan pemimpinmu dari orang-orang yang memperolok-olokkan dan mempermainkan agamamu yaitu diantara orang-orang yang telah diberi mkitab sebelumnya, dan orang-orang kafir(orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman* (QS.Al-Maidah:57).

Sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah hanya terbatas dalam hal baik menurut pandangan agama. Hanya ntaat itu dalam hal yang ma’ruf (*Innama tha’atun bil al-ma’ruf*). Bagaimana sekiranya pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama? Nabi bersabda “Barangsiapa diantara mereka memerintah kamu dengan (kepada) maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati.

Mendengar dan mentaati wajib atas manusia dalam apa-apa yang ia sukai dan juga dalam apa yang tidak disukai, kecuali bila ia disuruh kepada sesuatu yang maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh pula ditaati (*assamu’u waththa’atu ‘alal mar’I fima ahabba wa kariha illa an yuammara bi ma’shiyatin fala sama wala tha’ata*).

Sebenarnya agak sulit mendefinisikan dengan tegas siapa dimaksud dengan pemimpin Islam di Indonesia, pertama karena definisi adalah masalah persepsi, dan kedua, definisi itu selalu berkembang. Perkembangan definisi pemimpin Islam sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia.

Ada tiga fase dalam periodisasi kepemimpinan Islam di Indonesia. Setiap fase menunjukkan genesis kepemimpinan yang khas. Pertama,

fase ulama. Pada babakan inbi, seseorang menjadi pemimpin Islam karena ia memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Ia menjadi rujukan umat. Ia melewati masa awal hidupnya di pesantren sebagai santri dan menghabiskan sisa hidupnya juga di pesantren sebagai kiai. Dari pesantrennya keluar para santri yang nanti menjadi “agen-agen” kiai di seluruh Nusantara. Lewat para santri, kiai melebarkan pengaruhnya secara nasional bahkan internasional. Dari sejarah, diketahui bahwa pemimpin masyarakat yang potensial adalah ulama pesantren.

Kepemimpinan kiai bersifat transformasional. Ia memotivasi, mengubah, menggerakkan, dan mengarahkan pengikutnya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi. Pada gilirannya, para pengikutnya juga “mengontrol” kiai dengan menempatkan kiai sebagai anutan dan rujukan. Tidak ada hubungan transaksional pada babakan atau fase pertama ini.

Kedua, fase organisator. Sebagai reaksi terhadap kebijakan politik colonial, mungkin antara lain politik etis, umat Islam membentuk organisasi (social, ekonomi, atau politik). Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, Jami’atul Khair, dan lain-lain. Pada babakan ini, pemimpin Islam adalah pemimpin organisasi Islam. Tentu saja karier kepemimpinan kini tidak dimulai dari pesantren, tetapi di organisasi. Orasng menapak secarta berangsur-angsur atyau melompat hieraki orgnisasi. Variable kepemimpinan yang utama tidak lagi pengetahuan agama yang mendalam, tetapi keterampilan organisasi (*organizational skill*), termasuk *lobbying* dan kasak-kusuk, yang sampai ke tingkat nasional, melalui jenjang organisasi, pada umumnya adalah orang yang mempunyai pijakan lokal.

Pada awal fase ini terjadi persaingan antara tipe pemimpin pesantren dengan tipe pemimpin organisator. Persaingan ini mencapai puncaknya pada Masyumi. Tipe pemimpin pesantren akhirnya tergeser atau digeser. Mereka memisahkan diri dari Masyumi dan “memandirikan” (bukan mendirikan) NU. Akan tetapi, yang terjadi pada Masyumi kemudian juga terjadi di NU, pergolakan nyang btrimbul karenma pergesekan antara pemimpin pesantren dengan pemimpin organisator masih berlangsung sampai sekarang.

Ketiga fase pemuka pendapat (*opinion leader*). Pada fase pertama, pemimpin ulama lahir dan dibesarkan dipesantren. Pada fase kedua, pemimpin organisator lahir dari dan dibesarkan organisasi. Dimana dibesarkan pemimpin fase ketiga?

Di media massa yang dianggap sebagai pemimpin adalah para empu yang dianggap pandai melontarkan isu-isu penting untuk dijadikan agenda media massa (Jalauddin Rakhmat: 1999:32). Mereka menulis di media, atau menghadiri berbagai seminar dan diskusi. Atau mereka mampu menyedot massa yang banyak dalam acara-acara mereka. Apabila media massa yang mengagendakan isu-isu mereka itu local, mereka menjadi pemimpin Islam local. Apabila medianya nasional, mereka menjadi pemimpin Islam nasional.

Oleh karenanya, jika pengikut fase pertama, santri, fase kedua, anggotanya organisasi, maka pengikut fase ketiga adalah “fans” (penggemar). Pada fase ketiga pemimpin Islam menjadi “idola”. Ada dua jenis pemimpin pada fase ketiga.

Pertama, mubaligh. Ia mungkin memulai kariernya pada tingkat local. Ia berbicara pada mejelis-majelis taklim atau stasiun radio. Ceramahnya direkam, kemudian diproduksi dijual secara nasional. Media massa menyiarkan ceramahnya dan menokohnya. Tidak perlu mubaligh itu berasal dari pesantren; tidak perlu menguasai pengetahuan Islam yang mendalam; juga tidak perlu ia memiliki keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan menyajikan Islam sebagai *pop culture*. Karena digemari oleh orang banyak, para mubaligh menjadi *celebrities* (artis, pelawak, perancang mode, misalnya). Terjadilah tumpang tindih. Mubaligh menjadi artis, dan sebaliknya artis menjadi mubaligh.

Kedua, cendekiawan. Apabila mubaligh lebih banyak menyentuh ranah afektif, cendekiawan bergerak di ranah kognitif. Ia dibesarkan lewat kerja sama kampus dengan media massa. Melalui tulisan di media, seminar, dan diskusi, para cendekiawan membentuk jaringan pengikutnya. Seperti kata Abdul Rahman Wahid (Gus Dur), umumnya pengetahuan agama mereka sangat dangkal (Jalauddin Rakhmat; 1999:33). Akan tetapi analisis mereka tentang persoalan umat sangat tajam. Mereka membentuk opini, sikap, dan akhirnya tindakan umat Islam. Seperti pemimpin para ulama pada fase pertama, mereka juga

menjadi rujukan dan anutan. Kepemimpinan mereka juga lebih bersifat transformasional daripada transaksional.

Seperti pada fase kedua, sekarang ada tarikan yang kuat memasukkan cendekiawan kedalam jaringan birokrasi. Apabila itu terjadi, seperti para pendahulu mereka, para cendekiawan akan digeser oleh pemimpin organisator. Pola transformasional akan diganti dengan pola transaksional. Karena massa umat Islam cenderung tidak menyukai pandangan birokrat, mereka pun akan kehilangan banyak pengikut.

Di samping itu ada upaya untuk memasukkan cendekiawan pada organisasi (politik atau massa) Islam. Secara formal, mungkin banyak diantara mereka sudah berada dalam organisasi, tetapi naik ke posisi pemimpin tidak melalui jalur-jalur organisasi. Apabila kemudian mereka menjadi pemimpin organisator, mereka akan mengalami nasib seperti para pemimpin organisasi. Kepemimpinan mereka menjadi transaksional, dan umatnya akan terbatas lagi pada lingkungan organisasi yang dimasukinya.

Dengan demikian, karakteristik fase kedua masih mewarnai kepemimpinan Islam sekarang ini. Perubahan besar mungkin akan terjadi apabila tipe pemimpin fase ketiga ini bekerjasama dan bergabung dengan pemimpin ulama. Yakni pesantren, kampus dan media massa bersama-sama membesarkan mereka.

Terlepas dari semua itu, siapakah sebenarnya tergolong sebagai pemimpin umat dan bagaimana corak dan gaya kepemimpinan mereka dalam praktik kesehariannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, barangkali telaah sosiologis Max Weber, sebagaimana dikutip Malik Fajar (1999:44), dia dijadikan pangkal berangkatnya.

Sebagaimana yang diungkapkan Weber, ada tingkatan ukuran tentang orang yang tergolong sebagai pemimpin. Pertama, mereka yang secara tradisional atau berdasarkan keturunan (genetis), berhak menyandang dan dia diterima sebagai pemimpin serta mewarisi kepemimpinan leluhurnya.

Kedua, mereka yang secara karismatis dalam arti berdasarkan kelebihan yang dimiliki, berhak menyandang dan dia diterima sebagai pemimpin serta mewakili aspirasi dan kepentingan umatnya. Ketiga,

mereka yang secara rasional, dalam arti memenuhi persyaratan formal untuk diangkat dan didudukkan sebagai pemimpin.

Ketiga jenis ukuran itu (tradisional, karismatik, dan rasional), dalam kepemimpinan umat Islam, tampaknya akan terus berlangsung. Kalaupun terjadi pergeseran, (karena pengaruh perubahan sosial, budaya, ataupun ekonomi dan politik), sifatnya hanyalah adaptatif. Artinya pergeseran itu tidak terlalu mendasar, bahkan cenderung sekedar merupakan “kompromi”, agar tidak timbul gejolak yang mengakibatkan perpecahan.

D. Penutup

Pemimpin yang ideal paling tidak harus memenuhi beberapa syarat (Din Syamsuddin: 1999: 36): *Pertama*, ia harus memiliki penerimaan (*acceptability*) di kalangan umat sendiri, baik pada tingkat local maupun pada tingkat nasional, dan bahkan internasional.

Kedua, ia harus memiliki penghargaan di kalangan umat itu (*accountability*) baik karena kepengurusannya kemampuannya atas ilmu-ilmu keagamaan, maupun karena kemampuan manajerial dalam menjalankan roda organisasi kepemimpinannya. Dalam ungkapan lain, seorang pemimpin adalah seorang yang mampu memadukan kealiman yang tinggi dan kealiman yang dalam. Ini tidak hanya pemimpin bawahan, anggota atau jamaah, tetapi juga pembimbing spiritual dan intelektual mereka.

Ketiga, ia perlu memiliki kredibilitas di kalangan pemerintah dan umat lain sehingga dapat menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dalam konteks kekuasaan dan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Sejauh menyangkut identitas di atas, sepertinya tidak ada masalah atau kita semua dapat ber-*muttafaq'alaih*. Masalah yang tersisa adalah bagaimana mewujudkan sang pemimpin ideal tadi. Bahkan masalah mendasar adalah mungkinkah identitas tersebut terwujud dalam konteks realitas umat Islam Indonesia.

Realitas umat Islam di Indonesia menunjukkan fenomena kemajemukan, baik dalam paham keagamaan maupun dalam manifestasinya pada gerakan-gerakan sosial keagamaan. Kemajemukan

ini sejalan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri, atas dasar suku bangsa, bahasa dan agama.

Sigmentasi umat Islam di Indonesia antara lain mempunyai dimensi kultural. Keragaman kelompok umat Islam mempunyai latar budaya keagamaan (*religio-cultural*) yang relatif berbeda, sejalan dengan perbedaan latar “budaya kemasyarakatan” (*sosio cultural*) mereka.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Maududi, Abu al-'Ala, 1990. *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan
- Antonio, Muhammad Syafii. 2011, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*. Jakarta: Tazkia Publishing
- Budiardjo, Miriam, 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Burns, James McGregor. 1979. *Leadership*, New York: Harper & Row.
- Ezzati, A., 1990. *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, a.b. A.Sulistiyadi, Jakarta: Pustaka Hidayah
- Haekal, Muhammad Husain, 1992 *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa
- Isjwara, F. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta
- Kartono, Kartini. 1988. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali
- Maksum (ed)., 1999. *Mencari Pemimpin Umat*, Bandung: Mizan
- Mar'at, 1984. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Munawir, Imam. t.th. *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional
- Nasution, Harun dkk., 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. 1995. *Kepemimpinan Yang Efektif*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press

- Pamudjhi, 1989. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Panglaykim, J. 1984. *Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rais, Amin. M., 1990. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan
- Syafiie, Inu Kencana dan Arifin, Arviyan. 2004. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Syamsuddin, 2012, *Sejarah Dakwah Islam*, Bandung: Insan Komunika
- Watt, M. 1991, *Muhammad: Nabi dan Negarawan*, Jakarta: Intermedia